

Andi Suwirta, *Pers, Revolusi, dan Demokratisasi:
Studi tentang Kehidupan dan Pandangan
Lima Surat Kabar di Jawa pada Masa Revolusi
Indonesia, 1945-47*

PERS, REVOLUSI, DAN DEMOKRATISASI: KEHIDUPAN DAN PANDANGAN LIMA SURAT KABAR DI JAWA PADA MASA REVOLUSI INDONESIA, 1945-47

Oleh: Andi Suwirta *)

ABSTRAKSI:

Pengantar

Para peneliti dan pengkaji pers acapkali mengabaikan periode penting dalam sejarah kehidupan pers pada masa revolusi Indonesia. Dalam mengkaji perjuangan pers yang ideal dan kebebasan pers yang besar, misalnya, pembahasan lebih difokuskan pada kehidupan pers di zaman pergerakan nasional (1900-45) dan di zaman pasca revolusi kemerdekaan

*)Drs. **Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Lahir di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 9 Oktober 1962. Menyelesaikan pendidikan sarjana (Drs.) di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung tahun 1989; dan pendidikan S-2 (M.Hum.) di Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UI Jakarta tahun 1996 dengan menulis tesis *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), 1945-1947* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000). Banyak menulis buku, di antaranya adalah *Tasawuf dan Proses Islamisasi di Indonesia* (Bandung: Historia Utama Press, 2002). Untuk kepentingan akademis, Drs. Andi Suwirta, M.Hum. dapat dihubungi dengan alamat rumah: Komp. Vijaya Kusuma B11/15 Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Tlp.(022) 7837741.

(1950 - sekarang).¹ Sedangkan kehidupan dan kebebasan pers pada masa revolusi Indonesia, betapapun sudah ada beberapa studi yang sangat singkat, nampaknya kurang mendapat perhatian yang serius.² Padahal kalau saja mau mengkaji kehidupan pers, khususnya surat kabar, pada masa revolusi itu paling tidak akan ditemukan dua hal menarik.

Pertama, pers pada masa revolusi Indonesia mampu mengekspresikan dan mengartikulasikan visi politiknya secara sangat bebas, dimana kebebasan itu sendiri merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan semangat kemerdekaan. *Kedua*, pers mampu memainkan peranannya, meminjam kata-kata Ulrich Kratz, sebagai media koordinatif antara hasrat rakyat Indonesia yang ingin lepas dan merdeka di satu sisi, dengan

¹Tentang kehidupan pers pada zaman pra kemerdekaan lihat, misalnya, studi yang dilakukan oleh Evert-Jan Hoogerwerf, *Persgeschiedenis van Indonesie tot 1942, Geannoteerde Bibliografie* (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1990); Ahmat bin Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)* (Ithaca, New York: Cornell University, 1995); dan Dewi Yulianti, "Pers Bumiputera dalam Era Kolonial Belanda, Sinar Djawa-Sinar Hindia: Cermin Pergerakan Sarekat Islam Semarang 1914-1924, *Tesis Magister* (Jakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UI, 1993). Sedangkan tentang kehidupan pers pada zaman pasca kemerdekaan lihat Edward C. Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia 1949-1965, Terjemahan* (Jakarta: Grafiti Pers, cet.kedua, 1986); Oey Hong Lie, *Indonesian Government and Press during Guided Democracy* (England: The University of Hull, 1971); Ahmad Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia, 1966-1974* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 1995); Ignatius Haryanto, *Pembredelan Pers di Indonesia, Kasus Koran Indonesia Raya* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1996); dan David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

²Lihat, misalnya, tulisan Susanto Zuhdi, "Perjanjian Linggarjati Dilihat oleh Beberapa Surat Kabar Lokal di Jawa" dalam A.B. Lopian dan P.J. Drooglever (ed.), *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 135-50; Hilman Adil, "Pers di Kalimantan Selatan Sesudah Tahun 1945" dalam Abdurrachman Surjomihardjo (ed.), *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Leknas LIPI dan Deppen RI, 1980), hlm. 125-40; dan Suwirta, "Bertempoer atau Beroending: Tanggapan Pers di Jawa pada Masa Awal Revolusi Indonesia" dalam Zulfikar Ghazali (ed.), *Sejarah Lokal, Kumpulan Makalah Diskusi* (Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud, 1995), hlm. 62-87.

visi dari elite politik Indonesia tentang wujud kemerdekaan yang dicita-citakan di sisi lain.³

Tulisan ini akan mengkaji tentang kehidupan pers, khususnya surat kabar, yang terbit di Jawa pada masa revolusi Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada lima surat kabar yang terbit di kota-kota penting di Jawa, yaitu *Merdeka* di Jakarta, *Soeara Merdeka* di Bandung, *Warta Indonesia* di Semarang, *Kedaulatan Rakjat* di Yogyakarta, dan *Soeara Rakjat* di Surabaya. Pemilihan pada lima surat kabar itu didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, pada zamannya surat kabar itu merupakan pers yang berpengaruh bila dilihat dari jumlah oplah dan daerah penyebarannya yang relatif luas bila dibandingkan dengan pers lain yang terbit pada masa revolusi Indonesia.⁴ Dengan begitu maka apa yang disajikan oleh lima surat kabar itu, baik dalam bentuk berita (*news*) maupun pandangan-pandangan (*views*), dianggap penting oleh pemerintah dan masyarakat pembacanya. *Kedua*, kelima surat kabar itu relatif independen dalam artian tidak memiliki hubungan secara formal dengan organisasi sosial dan politik tertentu. Dengan demikian, dalam derajat tertentu, pandangan-pandangannya pun relatif independen dengan lebih mementingkan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan partai politik tertentu.

³Ulrich Kratz, "Peranan Pers dalam Revolusi" dalam Collin Wild dan Peter Carey (ed.), *Gelora Api Revolusi, Sebuah Antologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 49-51.

⁴Sebenarnya sulit menentukan jumlah oplah dan daerah penyebaran pers pada masa revolusi Indonesia itu. Namun berdasarkan catatan dan pengakuan dari pihak redaktur pers sendiri, jumlah oplah surat kabar pada masa itu berkisar antara 5.000 - 10.000 eksemplar. Surat kabar *Merdeka* di Jakarta, misalnya, mengklaim telah mencapai oplah 10.000 eksemplar, suatu jumlah yang sangat besar pada masa revolusi Indonesia, dengan daerah penyebaran tidak hanya menjangkau kota-kota penting di Jawa, tetapi juga sampai ke kota-kota lainnya di luar Jawa. Selanjutnya lihat B.M. Diah, "Soerat Terboroka oentoek Wartawan Indonesia", *Merdeka* (Jakarta: 11 Nopember 1946), hlm. 2; dan *Merdeka* (Jakarta: 13 Juni 1947), hlm. 4.

Adapun kurun waktu yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dari tahun 1945, tepatnya bulan September dan Oktober 1945, sampai dengan bulan Juni dan Juli 1947. Sebagaimana diketahui bahwa kelahiran pers Indonesia yang berjiwa “republikain”, dalam arti pers yang membela dan memperjuangkan tegaknya negara RI yang baru merdeka itu, adalah pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober 1945. Hampir di setiap kota penting dan hampir semua organisasi sosial-politik di Indonesia menerbitkan surat kabar sebagai salah satu media pemberi informasi, pembentuk opini publik, dan pembela kepentingan-kepentingan politiknya. Pertumbuhannya demikian subur sehingga sering digambarkan oleh kalangan pers sendiri seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan.⁵ Namun dalam perkembangan selanjutnya, terutama ketika persediaan kertas, tinta, dan bahan baku percetakan lainnya mulai menipis akibat blokade tentara Belanda pada awal tahun 1947, maka pers Indonesia yang berjiwa “republikain” itu mulai surut pertumbuhannya. Lebih-lebih setelah pihak Belanda melakukan Aksi Militer I pada bulan Juli 1947, tidak sedikit pers Indonesia yang sering diejek oleh Belanda sebagai “pers kiblik” dengan konotasi jelek itu, mulai gulung tikar karena dibredel atau ditutup penerbitannya.

Apa yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah pertamanya menguraikan tentang kelahiran dan pertumbuhan pers di Jawa pada masa awal revolusi Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka, pemerintah RI sangat membutuhkan dukungan dan peranan pers untuk memberikan informasi yang benar dan positif kepada masyarakat di satu sisi, dan untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia adalah negara demokratis di sisi lain. Dalam hal ini pembahasan akan

⁵ Lihat “Pengoemoeman Pemerintah Repoeblik Indonesia tentang Persoeratkabaran”, *Merdeka* (Jakarta: 12 Oktober 1945), hlm. 2.

difokuskan pada kelahiran dan peranan yang dimainkan oleh kelima pers yang terbit di Jawa itu. Sementara itu visi dan jati diri pers yang acapkali identik dengan pandangan dan kepentingan pemimpin redaksinya, juga akan dikaji dengan cara melihat profil para redaktur pers pada masa revolusi Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada latar belakang sosial, usia, pendidikan, dan orientasi pemikiran ideologinya, sehingga diperoleh gambaran tentang visi dan jati diri pers yang dikelolanya itu. Isyu-isyu politik dan sosial yang aktual pada zamannya, yang acapkali disorot oleh pers melalui sajian berita dan opini, juga akan dikaji secara selintas untuk memberikan gambaran tentang sikap, pandangan, dan pendirian kelima surat kabar di Jawa yang terbit pada masa revolusi Indonesia.

Surat Kabar *Merdeka* di Jakarta

Surat kabar *Merdeka* pertama kali terbit pada tanggal 1 Oktober 1945. Kelahiran surat kabar ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari peran B.M. Diah dan kawan-kawannya, yang pada akhir bulan September 1945 mengambil alih kantor surat kabar *Asia Raya* dan menduduki gedung percetakan De Unie di Jalan Molenvliet No. 8 (sekarang Jalan Hayam Wuruk, Jakarta), tempat surat kabar milik Jepang itu diterbitkan.⁶ Terbit setiap hari dengan dua lembar atau bahkan satu lembar, dengan demikian hanya empat atau dua halaman, *Merdeka* menyatakan dirinya sebagai pers yang berjiwa republikan. Dalam edisi perdananya, sebagaimana nampak dalam tulisan "Permoelaan Kata", *Merdeka* menyatakan akan mendukung pemerintah RI di satu sisi, dan membangkitkan semangat

⁶ JR. Chaniago et.al., *Ditugaskan Sejarah, Perjuangan Merdeka 1945-1985* (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987), hlm. 12.

rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan RI di sisi lain.⁷ Sikapnya itu semakin dipertegas dengan menetapkan motto yang populer bagi *Merdeka*, yaitu sebagai: “Soera Rakjat Republik Indonesia”. Walaupun begitu bukan berarti surat kabar ini akan membeo saja kepada kemauan dan kepentingan politik pemerintah. Sebagaimana akan diperlihatkan nanti, *Merdeka* ternyata memiliki kebebasan yang besar dalam mengekspresikan visi, sikap, dan pendirian para redaktur persnya. Hal itu nampaknya sejalan dengan motto lain yang ditetapkan oleh surat kabar ini, yaitu: “*Merdeka berfikir, merdeka berbitjara, dan merdeka menoeelis itoe hanja ada pada ra’jat merdeka*”.

Pada awal penerbitannya *Merdeka* tidak mencantumkan susunan nama-nama redaktornya. Baru pada akhir tahun 1945, surat kabar ini menuliskan nama B.M. Diah sebagai Pemimpin Umum dan R.M. Winarno sebagai Pemimpin Redaksi.⁸ Oplah surat kabar *Merdeka* termasuk paling besar pada zamannya, yaitu 10.000 eksemplar, dengan daerah penyebaran yang luas, tidak hanya menjangkau kota-kota penting di Jawa tetapi juga di luar Jawa.⁹ Dengan oplah dan daerah penyebaran yang

⁷ Lihat *Merdeka* (Jakarta: 1 Oktober 1945), hlm. 1.

⁸ Lihat *Merdeka* (Jakarta: 20 Desember 1945), hlm. 2. Menurut JR. Chaniago et.al., *Op.Cit.*, hlm. 11, susunan dewan redaksi surat kabar *Merdeka* itu adalah: B.M. Diah (Pemimpin Umum), R.M. Winarno (Pemimpin Redaksi), Rosihan Anwar (Redaktur Umum), M. Supardi dan Ramlan (Redaktur Dalam Negeri), Dal Bassa Pulungan, M.T. Hutagalung, D.M. Yahya, M. Salim Machmud, dan M. Husin (Staf Redaksi), H.B. Angin, A.Y. Mendur, dan S. Mendur (Bagian Foto), dan Abdul Salam (Karikatur).

⁹ Mengenai oplah surat kabar ini, lihat B.M. Diah, “Soerat Terborka oentoek Wartawan Indonesia”, *Merdeka* (Jakarta: 11 Nopember 1946), hlm. 3. Sedangkan mengenai daerah penyebarannya, selain memiliki agen di beberapa kota penting di Jawa seperti: Jakarta, Serang, Rangkasbitung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya (Jawa Barat); Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan Solo (Jawa Tengah); Blitar dan Malang (Jawa Timur); juga tercatat nama-nama kota di luar Jawa seperti: Palembang dan Tanjung Pandan (Sumatera); Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan); dan Makasar/Ujung Pandang (Sulawesi). Selanjutnya lihat *Merdeka* (Jakarta: 13 Juni 1947), hlm. 4.

luas itu, *Merdeka* termasuk pers yang berpengaruh bila dibandingkan dengan pers sezaman yang terbit di Jakarta seperti: *Berita Indonesia*, *Ra'jat*, dan *Siasat* misalnya. Berita-berita dan pandangan-pandangan *Merdeka* acapkali dirujuk oleh surat kabar lain, termasuk juga surat kabar yang sangat pro Belanda. Karena berita (*news*) dan pandangan-pandangan (*views*) *Merdeka* yang sangat pro Republik -- sementara ia tetap berada di daerah pendudukan tentara Sekutu, yaitu Inggris dan Belanda -- surat kabar itu pernah ditutup penerbitannya oleh tentara Belanda pada tanggal 20 Juli 1947, ketika terjadi peristiwa Agresi Militer I Belanda itu.

Visi dan jati diri *Merdeka* acapkali diidentikkan dengan sosok pribadi B.M. Diah, Pemimpin Umum surat kabar itu. Boerhanoeddin Mochamad Diah (biasa disingkat B.M. Diah), dilahirkan di Aceh, Sumatera, pada tanggal 7 April 1916.¹⁰ Pada masa awal revolusi, dengan demikian, usia B.M. Diah mencapai 29 tahun. Dalam usia yang relatif muda itu, B.M. Diah sudah memimpin surat kabar *Merdeka* di Jakarta. Dengan bekal pendidikan yang pernah dilaluinya -- mulai dari HIS, MULO, AMS (pendidikan dasar dan menengah pada zaman Belanda) dan Sekolah Jurnalistik Ksatrian Institut di Bandung - - B.M. Diah tumbuh menjadi seorang jurnalis yang nasionalis. Visi dan pribadi B.M. Diah sebagai jurnalis yang nasionalis itu juga ditempa oleh pengalaman hidupnya, ketika ia mulai bekerja sebagai Wakil Pemimpin Redaksi *Sinar Deli* di Medan pada tahun 1937-38. Keluar dari *Sinar Deli* (Medan) ia bersama-sama dengan Djojopranoto, seorang Digulis yang berideologi kiri (Murba), menerbitkan *Warta Harian* di Jakarta (1939-41).

¹⁰ Mengenai biodata B.M. Diah lihat Dasman Djamaluddin, *Butir-butir Padi B.M. Diah (Tokoh Sejarah yang Menghayati Zaman)* (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1992), hlm. 1-238; Gunseikanbu, *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 282; dan Soebagijo I.N., *Jagat Wartawan Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hlm. 470-76.

Pada zaman Jepang B.M. Diah, sebagaimana para pemimpin nasionalis dan tokoh pers lainnya, bekerjasama dengan pemerintah militer Jepang itu dan ditempatkan sebagai komentator bagian bahasa Inggris dan penyiaran bahasa Indonesia pada "Hoso Kyoku" (radio militer Jepang). B.M. Diah kemudian bekerja sebagai Staf Redaksi bagian Luar Negeri pada *Asia Raya*, surat kabar milik Jepang, di Jakarta (1942-45).

Memasuki zaman revolusi Indonesia, B.M. Diah, bersama dengan teman-teman muda lainnya, mengambil alih dan merubah surat kabar *Asia Raya* menjadi *Merdeka*. Pandangan-pandangan B.M. Diah dalam surat kabar *Merdeka*, selain nampak dalam kolom tajuk rencana yang sering ditulisnya, juga muncul dalam catatan pojok dengan nama samaran yang populer, yaitu "Dr. Clenik". Sebagai pemimpin pers yang terbit di daerah pendudukan tentara Sekutu (Inggris dan Belanda), B.M. Diah sangat mendukung politik diplomasi yang dijalankan pemerintah Sjahrir pada masa awal revolusi Indonesia. Dalam pandangan B.M. Diah, politik diplomasi yang ditujukan kepada dunia internasional agar mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara RI itu "[...] *soenggoeh soeatoe pedoman jang sangat diperloekan oleh rakjat dalam menghadapi dan mengalami zaman pantjaroba ini*".¹¹ Namun dalam perkembangan selanjutnya, ketika politik diplomasi itu menghasilkan Perundingan Linggarjati (Nopember 1946-Maret 1947) yang isinya dianggap merugikan eksistensi negara RI, B.M. Diah menentanginya dengan sikap, pandangan, dan pendirian yang sangat keras. Tajuk-tajuk dan catatan-catatan pojok surat kabar *Merdeka* di Jakarta dari bulan Nopember 1946 sampai dengan bulan Juli 1947 berisi pandangan yang sangat kritis, oposisional, dan menyerang kebijaksanaan politik

¹¹ Lihat "Pedoman Menoedjoe Kemenangan", tajuk *Merdeka* (Jakarta: 16 Desember 1945), hlm. 1.

pemerintah.¹² Dalam hal ini tidak terkecuali, tentu saja, kepada pihak-pihak yang mau berkolaborasi dengan pihak Belanda, seperti nampak dalam kasus didirikannya Negara Indonesia Timur di Makasar (sekarang Ujung Pandang), Sulawesi Selatan, dan Negara Pasundan di Bandung, Jawa Barat, surat kabar *Merdeka* menyerangnya dengan cara yang kasar dan emosional. Presiden NIT (Negara Indonesia Timur), Soekawati, misalnya, namanya diejek dengan diplesetkan menjadi "Sukamati" yang berarti lebih baik mati.¹³ Sedangkan Presiden Negara Pasundan, Kartalegawa, juga didiskreditkan dengan cara memberi arti lain singkatan namanya, yaitu "**KARTALEGAWA** = *Kaula Anak Rahayat Talaekan Anu Linglung Ewed Gundal Agung Walanda Asalna*" yang artinya: saya (Kartalegawa) anak rakyat jajahan yang linglung dan bingung, asalnya budak besar dari Belanda.¹⁴ Dan ketika Belanda melakukan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dan berhasil menduduki kota-kota penting di Jawa dan di Sumatera, *Merdeka* termasuk pers yang dibredel oleh tentara Belanda karena sajian berita dan opininya dianggap menghasut dan sangat provokatif. Orang-orang Belanda sendiri sering mengejek surat kabar Indonesia yang berjiwa "republikan" itu, termasuk di dalamnya *Merdeka*, sebagai "pers kiblik" dengan konotasi yang kurang baik. Akhirnya B.M. Diah baru boleh menerbitkan kembali surat kabar *Merdeka* di Jakarta pada

¹² Lihat, misalnya, tajuk-tajuk *Merdeka* (Jakarta) seperti: "Toenggoe Doeloe!" (29 Nopember 1946); "Sikap Pemimpin Negara" (13 Desember 1946); "Tidak Oesah Pessimistis" (28 Pebruari 1947); "Linggardjati Manakah jang akan Ditandatangani?" (19 Maret 1947); dan "Keadaan Perdjoeangan Kita" (27 Juni 1947).

¹³ Lihat "Notes Dr. Clenik", pojok *Merdeka* (Jakarta: 1 Pebruari 1947), hlm. 2.

¹⁴ "Notes Dr. Clenik", pojok *Merdeka* (Jakarta: 28 April 1947), hlm. 2.

tanggal 1 Oktober 1947 dengan visi dan citra diri yang lebih moderat.¹⁵

Surat Kabar *Soeara Merdeka* di Bandung

Surat kabar *Soeara Merdeka* terbit pada bulan September 1945.¹⁶ Surat kabar ini terbit di atas reruntuhan surat kabar *Tjahaja* milik Jepang. Dalam hal ini peran yang dimainkan oleh Boerhanoeddin Ananda dan Mohamad Koerdi dalam mengambil alih kantor surat kabar *Tjahaja* dan kemudian merubahnya menjadi *Soeara Merdeka* menjadi penting, sebab kedua orang itulah yang kemudian menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksinya. Terbit setiap hari dengan 4 halaman, *Soeara Merdeka* pada mulanya beralamatkan di Jalan Groot Postweg-Oost 54-56 (sekarang Jalan Asia Afrika), Bandung. Namun ketika terjadi bencana banjir pada bulan Nopember 1945, akibat meluapnya sungai Cikapundung, dan desakan tentara Sekutu agar kota Bandung dikosongkan dari para pemuda yang berjiwa republiken, *Soeara Merdeka* pun pindah ke daerah pedalaman dan beralamatkan di Jalan Galunggung 46, Tasikmalaya. Baik ketika masih di Bandung maupun di Tasikmalaya, visi dan jati diri *Soeara Merdeka* sebagai pers yang ingin menyuarakan kemerdekaan rakyat Indonesia di satu sisi, dan membela kepentingan politik negara RI di sisi lain tetap tidak berubah.

Pada zamannya *Soeara Merdeka* termasuk pers yang berpengaruh. Dengan oplah sekitar 5.000 - 7.500 eksemplar,

¹⁵ Lihat, misalnya, "Doea Sa'at", tajuk *Merdeka* (Jakarta: 1 Oktober 1947), hlm. 1.

¹⁶ Edisi perdana *Soeara Merdeka* yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta adalah tanpa nomor, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan. Namun menurut John R. Smail dalam studinya *Bandung in the Early Revolution 1945-1946* (Ithaca, New York: Cornell University, 1964), hlm. 49, *Soeara Merdeka* itu terbit pada tanggal 17 September 1945.

surat kabar ini mampu menjangkau kota-kota penting di seluruh Jawa Barat dan bahkan sampai pula ke kota Cilacap dan Purwokerto di Jawa Tengah.¹⁷ Sebagaimana lazimnya pers yang terbit pada masa revolusi, *Soeara Merdeka* tidak mencantumkan susunan dewan redaksinya. Baru pada tahun 1947 surat kabar ini mengumumkan nama-nama redaktur persnya yang terdiri dari: Boerhanoeddin Ananda (Pemimpin Umum), Mohamad Koerdi (Pemimpin Redaksi), Koko Koswara (Pemimpin Administrasi), M. Padmi (Pemimpin Perusahaan), dan Adiwikarta, Joso, Soeprapto, dan Atje Bastaman (Pemilik).¹⁸ Dari nama-nama redaktur pers itu, Mohamad Koerdi, sebagai Pemimpin Redaksi, memegang peranan yang penting dalam menentukan warna pemberitaan dan corak pandangan *Soeara Merdeka*. Lebih-lebih setelah surat kabar itu pindah ke Tasikmalaya, sebagai orang Sunda, Mohamad Koerdi sangat memahami perasaan, kemauan, dan harapan khalayak pembacanya. Tajuk-tajuk dan catatan pojok *Soeara Merdeka*, dengan demikian, banyak ditulis oleh Mohamad Koerdi. Sedangkan Boerhanoeddin Ananda sendiri, sebagai orang Sumatera Barat dan menjabat sebagai Pemimpin Umum *Soeara Merdeka*, nampaknya lebih tertarik untuk menganalisa berbagai masalah dan kejadian yang ada di luar negeri.¹⁹

Mengingat sentralnya peran yang dimainkan oleh Mohamad Koerdi dalam membentuk visi dan jati diri *Soeara Merdeka* ini, ada baiknya melihat latar belakang sosialnya secara selintas. Dilahirkan di Ciamis, Jawa Barat, pada tanggal 10 September 1907, Mohamad Koerdi, dengan demikian, pada

¹⁷ Wawancara dengan Atje Bastaman, mantan wartawan *Soeara Merdeka* (Bandung: 16 Oktober 1995). Dan mengenai agen-agen surat kabar ini, lihat *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 26 Nopember 1946), hlm. 4.

¹⁸ Lihat "Pemberi tahoean", *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 1 Juli 1947), hlm. 3.

¹⁹ Wawancara dengan Atje Bastaman (Bandung: 16 Oktober 1995).

masa awal revolusi berumur 38 tahun.²⁰ Pendidikan dasar (HIS) dan menengah (MULO) diselesaikannya pada tahun 1925 dan tahun 1929. Pengalaman jurnalistiknya ditempa sejak zaman kolonial Belanda dengan bekerja sebagai wartawan *Sipatahoenan*, sebuah pers milik organisasi Paguyuban Pasundan yang terbit mula-mula di Tasikmalaya (1927) dan kemudian di Bandung (1933). Visi dan karakter Mohamad Koerdi yang “*siger tengah*” (moderat), tenang, rasional, dan demokratis, nampaknya terbentuk dalam pergaulannya dengan tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan seperti Oto Iskandar Di Nata, Oto Koesoemasoebrata, dan R.A.A. Wiranatakoesoemah. Karena itu ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 dan menunjukkan sikap-sikap yang otoriter dan represif, Mohamad Koerdi pada mulanya tidak mau bekerjasama dengan pemerintah militer itu. Namun berkat bujukan dari berbagai pihak, termasuk kawan-kawan dan keluarganya sendiri, ia kemudian mau bergabung dengan *Tjahaja*, pers milik Jepang yang terbit di Bandung itu. Dan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, yang diikuti dengan lahirnya negara RI pada bulan Agustus 1945, Mohamad Koerdi dan kawan-kawan berinisiatif untuk mengambil alih surat kabar *Tjahaja* itu untuk dirubah menjadi *Soeara Merdeka*.

Sebagai pers “*republikein*” yang terbit di Bandung dan pada bulan Oktober 1945 tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) sudah menduduki kota itu, *Soeara Merdeka* sangat yakin dengan perlunya politik diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI di satu sisi, dan perlunya masyarakat bertindak tenang, teratur, rasional, dan taat kepada pemerintah

²⁰ Mengenai biodata Mohamad Koerdi, lihat Soebagijo I.N., *Op.Cit.*, hlm. 91-100; dan Gunseikanbu, *Op.Cit.*, hlm. 286.

RI di sisi lain.²¹ Bahkan ketika berbagai pihak, termasuk pers, melibatkan diri dalam pro-kontra di sekitar Perundingan Linggarjati pada bulan Nopember 1946-Maret 1947, *Soeara Merdeka* termasuk pers yang tetap konsisten dengan visi dan artikulasinya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu penting, serta perlunya berpikir dingin, tenang, dan rasional dalam mensikapi berbagai keadaan.²² Walaupun begitu bukan berarti surat kabar ini tidak punya daya kritis sama sekali. Sikap kritis *Soeara Merdeka* yang disampaikan dengan cara-cara yang halus, sopan, ksatria, dan rasional itu tetap ada seperti nampak dalam catatan-catatan pojoknya. Bahkan kritik-kritik yang lebih canggih, dengan nada sinis dan sarkastis, disampaikan lewat sajian cerpen (cerita pendek) kontekstual yang sering ditulis oleh M.O. Koesman, dengan inisial M.O.Km., seorang penulis lepas bekas wartawan *Sipatahoenan* pada zaman Belanda.

Begitulah, misalnya, ketika pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) sering menembaki para pemuda dengan senjata "mitrayleur", *Soeara Merdeka* mengejeknya dengan "mata lieur" alias membabi buta. Dan ketika Inggris berperan sebagai wasit dalam perundingan Indonesia-Belanda pada akhir tahun 1946, surat kabar ini memplesetkan istilah "wapenstilstand" (sikap tenang, berdiri tegap, dan siap sedia sambil memegang senjata sebagai tanda dimulainya perundingan) menjadi "wakil setan"; dan sikap Inggris sebagai wasit yang acapkali melakukan politik "intervensi" di Indonesia itu, disindirnya sebagai politik "incer bensin", terbukti dari kota-kota penting di Jawa dan di

²¹ Lihat, misalnya, tajuk-tajuk *Soeara Merdeka* (Bandung) seperti: "Kewadiban Kita" (18 September 1945); "Tetap Dibelakang Pemimpin" (20 September 1945); dan "Perdjoeangan Kita" (24 September 1945).

²² Lihat juga tajuk-tajuk *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya) seperti: "Di Linggardjati" (9 Nopember 1946); "Kekoeatan Bangsa" (18 Nopember 1946); "Kepentingan Nasional" (7 Desember 1946); dan "Keritik" (4 Maret 1947).

Sumatera yang diduduki oleh tentara Sekutu itu memang merupakan daerah produksi yang sangat potensial kekayaan alamnya.²³ Terhadap Sutan Sjahrir, Perdana Menteri RI, *Soeara Merdeka* sering menyebutnya dengan "Juragan" Sjahrir, sebuah istilah dengan konotasi feodal, merasa besar, dan pintar sendiri karena acapkali tidak mau menjelaskan secara rinci dan jelas kepada masyarakat tentang kebijaksanaan politik diplomasinya yang banyak mengundang kontroversi itu.²⁴

Sementara itu terhadap pihak-pihak yang dianggap anti-republiken, *Soeara Merdeka* -- berbeda dengan pers lain yang acapkali bersikap emosional dan kasar -- tetap bersikap halus, sopan, namun cukup tajam dan proporsional dalam melakukan kritik-kritik sosialnya. Kasus berdirinya Negara Pasundan pada bulan Mei 1947, dengan Kartalegawa sebagai Presidennya, dalam pandangan *Soeara Merdeka* dianggap sebagai fenomena wajar dalam sebuah revolusi dimana perubahan dan kekalutan sosial yang terjadi sangat cepat menyebabkan seseorang yang secara mental dan psikologis tidak siap akan melakukan tindakan yang aneh-aneh dan negatif. Tidak terkecuali dengan Oetje (panggilan akrab Kartalegawa), kata *Soeara Merdeka*, yang tidak siap menghadapi revolusi itu kemudian melakukan tindakan menerabas untuk kepentingan dirinya sendiri dan dimanfaatkan oleh Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia.²⁵ Begitu juga dengan kasus berdirinya NIT (Negara Indonesia Timur), *Soeara Merdeka* menanggapi dengan dingin namun tetap kena dan menggelitik kritik sosialnya. NIT itu, kata *Soeara Merdeka*, mungkin tepat bila diplesetkan menjadi "*Nog In Twijfel alias masih ragoe2 kata*

²³ *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 21 Oktober 1946), hlm. 3.

²⁴ Lihat M.O.Km., "Rapat Raksasa", *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 18 Nopember 1946), hlm. 3; dan "Satoe Tahoen", *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 26 Nopember 1946), hlm. 3.

²⁵ Lihat "Alat Pemetjah", tajuk *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 30 April 1947), hlm. 2; dan "Terkemoeka", pojok *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 3 Mei 1947), hlm. 2.

seseorang". Atau juga disebut sebagai "*Niet In Tel alias ta' masoek kolom*", sebuah sindiran yang menunjukkan bahwa NIT itu tidak penting, tidak populer, dan tidak perlu diperhatikan.²⁶

Betapapun *Soeara Merdeka* termasuk pers yang cukup moderat -- tidak hanya kepada pemerintah RI tetapi juga kepada pemerintah Belanda dan orang-orang Indonesia yang mau dijadikan kaki tangannya -- namun ketika Belanda melakukan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menduduki kota Tasikmalaya, surat kabar ini akhirnya dibredel juga. Seminggu sebelum aksi militer itu dilakukan, *Soeara Merdeka* sudah menangkap tanda-tanda ketidaksenangan Belanda terhadap pers republikan yang dinilainya menghasut dan menimbulkan permusuhan.²⁷ Setelah persnya ditutup, para redaktur *Soeara Merdeka* pergi mencari jalan sendiri-sendiri. Ada yang mengungsi ke daerah RI di Jawa Tengah, tapi ada juga yang nekad pergi ke Bandung, daerah yang telah diduduki Belanda, untuk menerbitkan pers yang menyuarakan kepentingan Republik. Mohamad Koerdi, misalnya, menerbitkan *Harian Indonesia* di Bandung pada akhir tahun 1947. Sedangkan Atje Bastaman, staf redaksi *Soeara Merdeka*, mendirikan kembali surat kabar *Sipatahoenan* di Bandung pada tahun 1948.²⁸

²⁶ Lihat "Apa N.I.T.", pojok *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 9 Mei 1947), hlm. 2.

²⁷ "Semangat perang pers Belanda", *Soeara Merdeka* (Tasikmalaya: 15 Juli 1947), hlm. 2.

²⁸ Dalam sebuah wawancara dengan penulis, Atje Bastaman (Bandung: 16 Oktober 1995) menyatakan bahwa keputusan untuk pindah dan berjuang ke daerah pendudukan Belanda, dengan cara mendirikan pers yang republikan, dipertimbangkan atas dasar : apabila berada di daerah Republik yang acapkali tidak aman karena gangguan dari para lasykar rakyat, misalnya, sangat boleh jadi nasibnya tragis seperti dialami Oto Iskandar Di Nata, Joesoef Koento, dan Dr. Meowardi yang meninggal di daerah Banten, Karawang, dan Solo. Sedangkan apabila berada di daerah pendudukan Belanda dan wartawan Indonesia itu dihukum atau ditembak Belanda misalnya, namanya akan terkenal dan menjadi masalah di dunia internasional.

Surat Kabar *Warta Indonesia* di Semarang

Kalau ada pers yang usianya sangat singkat pada masa revolusi, barangkali itulah yang terjadi dengan surat kabar *Warta Indonesia* di Semarang. Mulai terbit pada tanggal 29 September 1945, *Warta Indonesia* merupakan perwujudan baru dari surat kabar *Sinar Baroe* yang semula milik pemerintah pendudukan Jepang. Sejak awal berdirinya, surat kabar yang beralamatkan di Jalan Purwodinatan Tengah No. 22-24-26 Semarang itu sudah berjiwa republikan dan bahkan sangat berpihak pada kepentingan politik pemerintah RI. Hal itu bisa dilihat dari tujuan diterbitkannya *Warta Indonesia*, yaitu: “[...] oentoek membantoe oesaha K.N.I. choesoensja, serta segenap oesaha bangsa Indonesia oemoemnja, jang bersifat membangoen (constuctief) jang bermanfaat bagi langsoengnja Repoeblik Indonesia.”²⁹ Dan ketika KNI (Komite Nasional Indonesia) menjadi parlemen sementara dan didominasi oleh orang-orang Sosialisnya Sutan Sjahrir, *Warta Indonesia* termasuk pers yang mendukung politik diplomasi pemerintah Syahrir.³⁰

Namun ketika pertempuran antara pihak Sekutu dengan para pemuda Indonesia melanda Semarang dan kota-kota penting lainnya di Jawa pada bulan Oktober 1945, sikap *Warta Indonesia* mulai keras. Slogan-slogan bombastis dengan maksud untuk membangkitkan semangat perlawanan pemuda, menghiasi halaman-halaman pertama surat kabar ini seperti: “*Sak Doemoek Batoek Sak Njatji Boemi, Wedjangan leloehoer jang pantas dipeloek oleh 70.000.000 ketoeroenannja*”.³¹ Begitu juga

²⁹ *Warta Indonesia* (Semarang: 29 September 1945), hlm. 1.

³⁰ Lihat, misalnya, tajuk-tajuk *Warta Indonesia* (Semarang) seperti: “Diplomasi Kita” (1 Oktober 1945); “Tenang ... !” (22 Oktober 1945); dan “Kenjataan” (26 Oktober 1945).

³¹ *Warta Indonesia* (Semarang: 29 Oktober 1945), hlm. 1.

ketika terjadi pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya yang hebat itu, *Warta Indonesia* mengeluarkan “fatwa jihad” yang khusus ditulis oleh K.H. Moenawar Cholil, ulama terkenal di Semarang, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mati mempertahankan kemerdekaan tanah airnya maka ia “*termasoek mati sjahid djoega*”.³²

Warta Indonesia terpaksa menghentikan penerbitannya pada pertengahan bulan Nopember 1945. Keadaan kota Semarang yang tidak aman dan berhasil diduduki oleh tentara Sekutu, menjadikan para redaktur *Warta Indonesia* mengungsi ke daerah lain yang lebih aman. Mohamad Hetami,³³ Pemimpin Redaksi *Warta Indonesia*, tidak bisa berbuat banyak untuk meneruskan penerbitan surat kabarnya itu, kecuali menunggu saat dan waktu yang tepat. Mohamad Hetami nampaknya baru bisa menerbitkan kembali pers sebagai media penyaji informasi dan pembentuk opini publik itu pada tahun 1950, saat Indonesia sudah diakui kedaulatannya oleh Belanda, dengan memimpin surat kabar *Suara Merdeka* di Semarang. Namun betapapun usia *Warta Indonesia* itu singkat, kehadiran dan peranannya pada masa awal revolusi Indonesia tetap penting. Sebagai surat kabar yang berpengaruh pada zamannya -- dengan oplah sekitar 5.000 eksemplar³⁴ dan

³² Lihat K.H. Moenawar Cholil, “Kata Nabi Moehammad S.A.W.”, *Warta Indonesia* (Semarang: 10 Nopember 1945), hlm. 2.

³³ Penulis belum berhasil mendapatkan biodata tokoh ini. Mungkin ia termasuk jurnalis muda yang mulai aktif di dunia pers pada zaman pendudukan Jepang. Nama Mohamad Hetami memang tidak tercantum dalam daftar *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa* yang disusun oleh Gunseikanbu (pemerintah militer AD Jepang) dan buku *Jagat Wartawan Indonesia* yang ditulis oleh Soebagijo I.N..

³⁴ Data mengenai oplah *Warta Indonesia* ini didapat dari kenyataan bahwa surat kabar *Sinar Baroe* di Semarang yang terbit pada zaman Jepang dan kemudian berubah menjadi *Warta Indonesia* itu, pada tahun 1944 telah beroplak 5.283 eksemplar. Selanjutnya lihat Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 64.

daerah penyebaran di kota-kota pantai utara Jawa Tengah -- *Warta Indonesia* telah menjadi saksi tentang berbagai kejadian aktual di kota Semarang dan daerah sekitarnya pada masa awal revolusi Indonesia.

Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat* di Yogyakarta

Jika *Warta Indonesia* di Semarang termasuk pers yang singkat usianya, maka *Kedaulatan Rakjat* di Yogyakarta termasuk pers yang panjang usianya. Terbit di daerah pedalaman, Yogyakarta, yang juga menjadi ibukota negara RI sejak tahun 1946, *Kedaulatan Rakjat* seperti tidak terganggu oleh kehadiran tentara Sekutu yang mulai berdatangan dan menduduki kota-kota penting lainnya di Jawa. Setidaknya sampai bulan Desember 1948, ketika Belanda melakukan Agresi Militer II dengan menduduki kota Yogyakarta, *Kedaulatan Rakjat* terus terbit. Namun dalam usia penerbitannya yang panjang selama revolusi itu, surat kabar ini mengalami dinamika internal yang menarik untuk dicermati, terutama yang menyangkut perubahan visi dan jati dirinya dari pers yang sangat kritis dan vokal pada masa awal revolusi menjadi pers yang akomodatif dalam perkembangan selanjutnya. Perubahan visi dan jati diri *Kedaulatan Rakjat* itu diwarnai juga dengan perubahan susunan dewan pimpinan redaksinya. Sebagaimana akan dijelaskan nanti, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama revolusi turut mewarnai dinamika internal dan perkembangan *Kedaulatan Rakjat*.

Kedaulatan Rakjat mulai terbit pada tanggal 27 September 1945. Alamat redaksinya di Jalan Mangkubumi No. 22 Yogyakarta. Sebagaimana pers republikan yang lain, *Kedaulatan Rakjat* sejak awal penerbitannya juga menyatakan sikap: “[...]”

berdiri sepenoeh2nja dibelakang Repoeblik".³⁵ Kelahiran surat kabar ini tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh Bramono, Soemantoro, Samawi, dan kawan-kawan lainnya yang pada tanggal 25 September 1945 mengambil alih kantor surat kabar *Sinar Matahari* milik Jepang itu. Pada awal penerbitannya *Kedaulatan Rakjat* tidak mencantumkan susunan dewan redaksinya. Baru pada bulan Oktober 1945 diumumkan bahwa para pengelola surat kabar ini adalah: Bramono (Pemimpin Umum), Soeprijo Djojosoepadmo (Wakil Pemimpin Umum), Soemantoro (Pemimpin Redaksi), Samawi (Wakil Pemimpin Redaksi), S. Tjokrodjojo (Urusan Luar Negeri), Soelardi (Urusan Dalam Negeri), Djoemadi, Moeljono, dan Martomojo (Urusan Kota), Moh. Noer Drijodjipoerwo (Pemimpin Percetakan), dan Soehiswadi (Karikaturis?).³⁶ Terbit setiap hari dengan 4 halaman, *Kedaulatan Rakjat* memiliki oplah sekitar 10.000 eksemplar dengan daerah penyebaran mencapai beberapa kota penting di Jawa. Dan bila dibandingkan dengan pers lain yang terbit di kota yang sama, Yogyakarta, seperti *Al-Djihad*, *Harian Nasional*, *Boeroeh*, dan *Revoloesioner*, maka *Kedaulatan Rakjat* jelas termasuk pers yang paling berpengaruh dan besar pada zamannya.³⁷

³⁵ Sayang sekali penulis belum menemukan terbitan nomor perdana *Kedaulatan Rakjat* pada tanggal 27 September 1945. Di Perpustakaan Nasional Jakarta, dalam bentuk mikro film, surat kabar ini dimulai dengan no. 10, Selasa, 9 Oktober 1945, itupun keadaannya sudah agak sulit dibaca. Sedangkan di Perpustakaan Sonobudoyo Yogyakarta, dalam bentuk mikro film juga, surat kabar ini dimulai dengan no. 5, Selasa, 2 Oktober 1945. Penulis mendapatkan sikap dan visi *Kedaulatan Rakjat* sejak didirikannya, berdasarkan refleksi HUT surat kabar ini yang pertama. Selanjutnya lihat "Setahoen", tajuk *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 27 September 1946), hlm. 1.

³⁶ Lihat "Soesoenan Redaksi K.R.", *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 12 Oktober 1945), hlm. 2.

³⁷ Soebekti, "100 Tahun Perkembangan Pers di Daerah Djawa Tengah" dalam Soedarjo Tjokrosisworo (ed.), *Kenangan Sekilas Perdjjuangan Surat kabar, Sedjarah Pers Sebangsa* (Djakarta: S.P.S., 1958), hlm. 190.

Pada masa awal revolusi, *Kedaulatan Rakjat* termasuk pers yang paling bersemangat dalam membela eksistensi kemerdekaan RI di satu sisi, serta menyerang pihak Belanda dan mereka yang mau menegasikan kemerdekaan Indonesia di sisi lain. Surat kabar ini juga termasuk yang menentang keras dan bersikap sangat kritis kepada pemerintah Sjahrir ketika akan melakukan politik diplomasi dengan pihak Belanda. Dalam pandangan *Kedaulatan Rakjat*, politik diplomasi itu bukan saja tidak efektif tetapi juga tidak jantan dan tidak berani bertempur di tengah-tengah gelombang revolusi yang hebat itu.³⁸ Untuk menunjukkan ketidaksetujuannya pada politik diplomasi, Bramono, Pemimpin Umum *Kedaulatan Rakjat*, membuat sumpah bahwa dirinya akan berjuang ke medan pertempuran dan tidak akan kembali lagi ke meja redaksi sebelum revolusi Indonesia ini selesai.³⁹ Pernyataan sumpah yang dilakukan Bramono pada masa revolusi itu memang bukanlah hal yang aneh. Para pemuda lain yang berjiwa revolusioner -- entah untuk main-main atau serius -- sering juga berkata seperti: "Saya bersumpah tidak akan menikah, atau saya berjanji tidak akan pulang ke rumah, atau saya bersumpah tidak akan mencukur rambut saya, dan sebagainya, sebelum perjuangan dalam revolusi ini selesai".⁴⁰

³⁸ Lihat, misalnya, tajuk-tajuk *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta) seperti: "Demokrasi" (23 Nopember 1945); dan "Memboeang-boeang Tempo" (2 Januari 1946).

³⁹ Lihat "Berita Poetjoek Pimpinan K.R.", *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 23 Nopember 1945), hlm. 2, dimana Bramono menyatakan: "Moelai hari ini ... jang bertanda tangan dibawah ini sama sekali meninggalkan kantor s.k. Kedaulatan Rakjat dalam waktoe tempo jang tidak tertentoe, oentoek melakoekan panggilan djiwanja dalam medan perdjoeangan repoloesi membela kehormatan Noesa dan Bangsa. Jang bertanda tangan dibawah ini, telah berdjandji kepada diri sendiri tidak akan kembali kekantor, poela tidak akan kembali keroemahnja, sebeloem perdjoeangan repoloesi membela Noesa dan Bangsa ini selesai ...".

⁴⁰ Masalah "sumpah pemuda" pada masa revolusi ini disinggung secara menarik oleh Soe Hok Gie, "Simpang Kiri dari Sebuah Djalan (Kisah

Sementara itu Soemantoro, Pemimpin Redaksi *Kedaulatan Rakjat*, karena tidak setuju dengan politik diplomasi yang dijalankan pemerintah Sjahrir mulai menampilkan dan mempromosikan Tan Malaka, seorang tokoh pejuang komunis yang nasionalis sejak zaman kolonial Belanda, sebagai tokoh alternatif bagi pimpinan nasional.⁴¹ Dan untuk menandingi pemikiran politik Sutan Sjahrir yang tertuang dalam brosur *Perdjoeangan Kita*, dan dicetak oleh Kementerian Penerangan RI, *Kedaulatan Rakjat* juga mencetak dan menyebarkan pemikiran Tan Malaka yang berjudul *Politik* (kemudian berubah menjadi *Moeslihat ?*).⁴² Dengan cara seperti itu nampaknya surat kabar ini ingin memuji Tan Malaka sebagai pemimpin sejati yang berjiwa revolusioner di satu sisi, dan di sisi lain ingin mengejek Sutan Sjahrir sebagai “pemimpin pertengahan” yang digambarkannya sebagai: “[...] *semoeanja setengah, sikapnja setengah2, keberaniannja setengah, pikirannja poen setengah2 poela, djadi alias pemimpin setengah matang*”.⁴³

Visi dan jati diri *Kedaulatan Rakjat* pada masa awal revolusi, dengan demikian, sangat diwarnai oleh pandangan dan kepentingan Bramono dan Soemantoro, masing-masing sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi surat kabar itu. Setelah Bramono meninggalkan *Kedaulatan Rakjat* pada bulan Nopember 1945, maka warna pemberitaan dan corak pandangan surat kabar ini jelas dipengaruhi oleh pribadi Soemantoro.⁴⁴ Lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 September

Pemberontakan Madiun 1948”, *Skripsi Sarjana tidak diterbitkan* (Jakarta: Djurusan Sedjarah FS-UI, 1969), hlm. 104-06.

⁴¹ Lihat “Tan Malaka”, tajuk *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 13 Desember 1945), hlm. 1.

⁴² Analisa yang menarik terhadap kedua brosur itu, baca Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 299-326.

⁴³ *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 21 Januari 1946), hlm. 2.

⁴⁴ Mengenai biodata Soemantoro, lihat Soebagijo I.N., *Op.Cit.*, hlm. 390-96.

1920, Soemantoro termasuk jurnalis yang masih muda pada masa revolusi, yaitu berusia 25 tahun. Dengan modal pendidikan dasar dan menengah pada zaman Belanda (HIS, MULO, dan AMS), Soemantoro sebenarnya termasuk orang baru dalam dunia pers. Ia mulai aktif menggeluti bidang pers pada zaman Jepang dengan bekerja sebagai staf redaksi pada surat kabar *Sinar Matahari* di Yogyakarta dan (karena baru pula) namanya tidak tercantum dalam daftar *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa*, yang disusun oleh Gunseikanbu, pemerintah militer AD Jepang. Sebagaimana umumnya pemuda terdidik yang hidup pada zaman Jepang, Soemantoro memiliki kecenderungan pemikiran dan gerakan “kiri” anti fasis, dalam hal ini Murba, dalam tulisan-tulisannya yang halus namun tajam di surat kabar *Sinar Matahari* milik pemerintah Jepang itu.⁴⁵ Dan ketika revolusi Indonesia terjadi, Soemantoro dan kawan-kawannya mengambil alih kantor surat kabar *Sinar Matahari* itu untuk dirubah menjadi *Kedaulatan Rakjat*.

Soemantoro sering menulis tajuk rencana dan catatan pojok di *Kedaulatan Rakjat*. Nama samarannya yang terkenal apabila ia menulis di catatan pojok adalah “Mas Semprot”. Nama itu nampaknya cocok dengan karakter jiwa muda Soemantoro yang selalu mengkritik, memarahi, dan menegur pihak lain -- tidak terkecuali terhadap pemerintah apabila dinilainya salah -- dengan bahasa yang keras, tegas, dan

⁴⁵ Adalah Soemantoro yang berani menyatakan sikapnya mendukung kemerdekaan RI, sementara redaktur pers lain masih bersikap hati-hati, ketika terdengar berita diproklamasikannya kemerdekaan negara RI oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Dengan menulis tajuk berjudul “Suara Merdeka” dan dimuat dalam *Sinar Matahari* (Yogyakarta: 19 Agustus 1945), Soemantoro antara lain menyatakan: “... Bagaikan burung, kini bangsa Indonesia terlepas dari sangkarnya. Burung2 jang dilepaskan dari sangkarnya terbang diangkasa jang leluasa, mengisap hawa kemerdekaan. Burung2 itu tentu seekorpun tidak ada jang berpikiran akan kembali lagi masuk kedalam sangkar, walaupun diudara merasa belum dapat terbang dengan sewadjarnya, terbang masih tanggung2. Burung2 itu tidak ada jang ingin kembali kedalam kurungan”.

bahkan kasar. Kritik-kritik keras dan kasar Soemantoro kepada pemerintah sudah diperlihatkan, bukan saja mengejek Sutan Sjahrir sebagai “*half-gaar man alias manoesia setengah mateng*”, tetapi juga menuduh Perdana Menteri RI pertama itu -- karena terus melakukan negosiasi dan perundingan dengan pihak Belanda -- sebagai “*pendjilat dan pengchianat bangsa*”.⁴⁶ Sikap dan pandangan Soemantoro yang keras itu, sebagaimana nampak dalam tajuk rencana dan catatan pojok *Kedaulatan Rakjat*, tentu saja mendapat reaksi dari pemerintah. Melalui Menteri Pertahanan, Mr. Amir Sjarifoeddin, dan Menteri Dalam Negeri, Dr. Soedarsono, pemerintah pada bulan Maret 1946 mengeluarkan maklumat yang berisi ancaman kepada pihak oposisi, termasuk pers, yang dinilai mengganggu keamanan dan keselamatan negara RI.⁴⁷ Selanjutnya tak pelak lagi ketika terjadi “Peristiwa 3 Juli 1946”, dimana kelompok oposisi yang menurut pemerintah didalangi oleh Tan Malaka akan melakukan kudeta, pemerintah merazia dan menangkap mereka yang masuk kelompok oposisi. Dalam hal ini Soemantoro termasuk tokoh pers yang terkena razia politik pemerintah itu.⁴⁸

Setelah Soemantoro, Pemimpin Redaksi *Kedaulatan Rakjat*, itu ditahan maka visi dan jati diri surat kabar ini mengalami perubahan besar. Dari citra pers yang kritis, keras, dan oposisional kepada pemerintah pada masa awal revolusi, *Kedaulatan Rakjat* berubah menjadi pers yang akomodatif, moderat, dan “manut” kepada pemerintah dalam

⁴⁶ Lihat *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 28 April 1946), hlm. 1.

⁴⁷ Lihat Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri RI, “Tindakan dalam Masa Genting” dalam *Berita Repoeblik Indonesia* (Jakarta: 15 April 1945), hlm. 110.

⁴⁸ Selain Soemantoro, orang-orang pers yang juga ditahan oleh pemerintah itu adalah Sajoeti Melik (staf redaksi *Kedaulatan Rakjat*), Adam Malik dan Pandoewigoena (keduanya dari Kantor *Berita ANTARA*). Selanjutnya lihat “Penahanan”, tajuk *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 3 Juli 1946), hlm. 1.

perkembangan selanjutnya. Nama penjaga catatan pojoknya juga berubah dari "Semprot" menjadi "Semar" dengan konotasi, tentu saja, bersikap bijaksana, menasihati, mendamaikan, dan memberi petuah yang baik-baik kepada pemerintah. Susunan pimpinan redaksi juga turut berubah. Pemerintah merestui masuknya Madikin Wonohito, bekas Pemimpin Umum surat kabar *Gelora Rakjat* di Bogor, Jawa Barat, pada masa awal revolusi, untuk memimpin *Kedaulatan Rakjat* menggantikan posisi Bramono yang telah meninggalkan surat kabar itu sejak Nopember 1945. Sedangkan posisi Soemantoro sebagai Pemimpin Redaksi *Kedaulatan Rakjat*, digantikan oleh Samawi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Baik Madikin Wonohito maupun Samawi, keduanya adalah tokoh pers yang sikap dan pandangan-pandangannya memang tergolong moderat dan akomodatif terhadap pemerintah. Sikap Madikin Wonohito (lahir di Kedu, Jawa Tengah, pada tanggal 31 Desember 1912) ketika memimpin *Gelora Rakjat* di Bogor memang tergolong moderat, terutama kepada pemerintah Sjahrir. Hal itu disebabkan oleh dua hal: *pertama*, ia sesungguhnya masih memiliki ikatan persaudaraan dengan Margono Djojohadikoesoemo, sebuah keluarga yang dinilai dekat dengan tokoh Sosialis Sutan Sjahrir;⁴⁹ dan *kedua*, sebagai orang yang dibesarkan dalam tradisi kebudayaan Jawa, Madikin Wonohito memiliki kiat tersendiri dalam mengkritik kepada pemerintah, yaitu berdasarkan prinsip hidup "*nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake*", sebuah sikap hati-hati dan moderat yang maknanya bagaimana menyerang orang lain tanpa menggunakan kekerasan dan bisa menang tanpa merendahkan martabat orang yang dikalahkannya itu.⁵⁰ Akan

⁴⁹ Lihat Soebagijo I.N., *Op.Cit.*, hlm. 310-15.

⁵⁰ Wawancara dengan Soemadi M. Wonohito, putra Madikin Wonohito dan Pemimpin Umum *Kedaulatan Rakyat* sekarang (Yogyakarta: 30 September 1995).

halnya Samawi, betapapun ia adalah orang Sumatera (lahir di Bukittinggi, pada tanggal 15 Agustus 1914), namun dalam kenyataannya sudah merasa menjadi “*wong Jowo*”, manusia Jawa. Sejak zaman Jepang (1942) ia tinggal di Yogyakarta dan nampaknya menghayati betul nilai-nilai kebudayaan Jawa itu,⁵¹ yang salah satu prinsip hidupnya dalam mengkritik orang lain adalah dengan cara “*ngono yo ngono ning ojo ngono*”, sebuah sikap betapapun ia tidak setuju dengan pendirian orang lain, termasuk dengan pemerintah, tetapi cara menyatakan kritik atas ketidaksetujuannya itu dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung perasaan atau harga diri orang lain.

Dari gambaran seperti itu menjadi jelas bahwa visi dan jati diri *Kedaulatan Rakjat*, setelah dipimpin oleh Madikin Wonohito dan Samawi pada pertengahan tahun 1946, menjadi moderat dan akomodatif kepada pemerintah.⁵² Karena itu tidaklah mengherankan ketika masyarakat Indonesia, termasuk kalangan pers, dihadapkan pada masalah pro-kontra disekitar Perundingan Linggarjati (Nopember 1946-Maret 1947), maka *Kedaulatan Rakjat* termasuk pers yang sangat mendukung pendirian dan kebijaksanaan politik pemerintah.⁵³ Tidak hanya itu, surat kabar ini acapkali memuji-muji gaya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI, Soekarno dan Mohamad Hatta di satu sisi;⁵⁴ dan di sisi lain, yang lebih

⁵¹ Soebagjo I.N., *Op.Cit.*, hlm. 403-07.

⁵² Adalah menarik untuk dicermati bahwa mungkin karena Madikin Wonohito dan Samawi itu tergolong “anak baik” pemerintah, maka yang diakui sebagai “the founding fathers of *Kedaulatan Rakjat Daily*” sampai sekarang adalah dua tokoh itu, bukan Bramono dan Soemantoro.

⁵³ Lihat, misalnya, tajuk-tajuk *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta) seperti: “Melihat Lebih Djaoeh” (19 Nopember 1946); “Sedikit Bitjara” (5 Maret 1947); dan “Naskah Linggardjati” (6 Maret 1947).

⁵⁴ Lihat pojok *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 1 Maret 1947) hlm. 2; dan “Serentak Dibelakang Soekarno”, tajuk *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 27 Juni 1947), hlm. 1.

penting, *Kedaulatan Rakjat* juga memuji Sutan Sjahrir -- tokoh Perdana Menteri RI yang pada masa awal revolusi justru dimaki-maki -- sebagai pemimpin politik dan negarawan RI yang pandangan-pandangan dan pikiran-pikirannya selalu mendahului zamannya dan, karenanya, berada di atas kemampuan orang kebanyakan.⁵⁵ Namun berbagai pujian terhadap pemimpin RI itu, tentu saja, dibarengi juga dengan serangan-serangan yang tajam, keras, dan kasar terhadap mereka yang dianggap sebagai lawan dari pemerintah RI. Dalam hal ini serangan *Kedaulatan Rakjat* terhadap tokoh-tokoh yang mau mendirikan Negara Indonesia Timur di Makasar (Ujung Pandang) dan Negara Pasundan di Bandung, tidak kalah garangnya dengan pers republikein yang lain. Dalam pandangan *Kedaulatan Rakjat*, NIT (Negara Indonesia Timur) itu lebih tepat apabila diartikan sebagai: "*Negara Ikoet Toean*", karena tokoh-tokohnya (Tjokorde Gde Rake Soekawati, Nadjamoeddin Daeng Malewa, dan Tadjoeeddin Noer) akan selalu mengikuti dan mengekor saja apa yang dikehendaki oleh Belanda sebagai tuan mereka.⁵⁶ Sedangkan terhadap Soerja Kartalegawa, pendiri Negara Pasundan yang didalangi Van Mook dari Belanda, *Kedaulatan Rakjat* mengejeknya sebagai tokoh yang pantas diberi nama: "*Mohamad Van Mook Soerja Nica Kartalegawa*".⁵⁷ Pujian dan dukungan *Kedaulatan Rakjat* terhadap pemerintah RI di satu sisi, dan serangan terhadap pihak Belanda dan orang-orang Indonesia yang mau dijadikan kaki tangannya di sisi lain itu, terus berlangsung sampai dengan tentara Belanda melakukan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Surat kabar ini beruntung tidak dibredel oleh Belanda, karena dalam Agresi Militer I itu tentara Belanda

⁵⁵ "Motor Baroe", tajuk *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 1 Juli 1947), hlm. 1.

⁵⁶ Lihat pojok *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 21 Mei 1947), hlm. 2.

⁵⁷ Lihat "Mohamad van Mook Soerja-nica ...", pojok *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta: 15 April 1947), hlm. 2.

tidak sampai menduduki Yogyakarta, dan menjadi saksi sejarah tentang perlawanan bangsa Indonesia, baik secara diplomasi maupun militer, dalam mempertahankan kemerdekaannya dari gangguan pihak Belanda. Baru ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki Yogyakarta, *Kedaulatan Rakjat* termasuk pers yang ditutup penerbitannya karena dianggap menghasut dan menimbulkan permusuhan terhadap Belanda.

Surat Kabar *Soeara Rakjat* di Surabaya

Kisah surat kabar *Soeara Rakjat* di Surabaya barangkali bisa disejajarkan dengan *Soeara Merdeka* di Bandung. Sama-sama terbit di daerah pendudukan tentara Sekutu, yang menguasai kota Bandung dan Surabaya sejak bulan Oktober 1945, kedua surat kabar itu harus “hijrah” ke daerah pedalaman yang relatif lebih aman. Kalau *Soeara Merdeka*, sebagaimana telah dijelaskan di muka, harus pindah dari Bandung ke Tasikmalaya; maka *Soeara Rakjat* harus pindah dari Surabaya ke Malang, Mojokerto, dan Kediri. Akhir perjalanan hidup kedua surat kabar itu juga sama. Ketika Belanda melakukan tindakan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dan menduduki kota-kota penting di Jawa, termasuk kota tempat penerbitan *Soeara Merdeka* dan *Soeara Rakjat*, maka kedua surat kabar itu dibredel oleh Belanda dengan alasan yang sama pula: “menghasut dan menimbulkan permusuhan kepada Belanda”. Dalam tulisan ini akan dibahas *Soeara Rakjat* yang pernah terbit di Surabaya dan di Malang saja, dengan alasan data-datanya cukup lengkap bila dibandingkan dengan *Soeara Rakjat* yang terbit di Mojokerto dan Kediri.

Surat kabar *Soeara Rakjat* mulai terbit pada tanggal 1 Oktober 1945, dengan alamat redaksi di Jalan Alun-alun No. 30, Surabaya. Terbit setiap hari 1 lembar, dengan demikian

hanya dua halaman, *Soeara Rakjat* merupakan pers yang berpengaruh di Surabaya dengan oplah sekitar 5.000-7.500 eksemplar dan daerah penyebarannya menjangkau kota-kota penting di Jawa Timur.⁵⁸ Sebagaimana pers lain yang terbit pada masa revolusi, *Soeara Rakjat* pada mulanya tidak mencantumkan nama-nama dewan redaksinya. Baru setelah pindah ke Malang, surat kabar ini mengumumkan para redaktur persnya yang terdiri dari: Mohamad Sofwanhadi (Pemimpin Umum), Abdoel Azis (Pemimpin Redaksi), dan Ibnoe Soejachman (Pemimpin Tata Usaha).⁵⁹ *Soeara Rakjat* muncul sebagai pers “republikain” di Surabaya setelah menggantikan penerbitan *Soeara Asia*, surat kabar milik pemerintah Jepang. Kelahiran *Soeara Rakjat*, tentu saja, tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh Mohamad Sofwanhadi dan Abdoel Azis, yang memang acapkali menulis tajuk rencana, sebagai visi dari surat kabar yang dikelolanya, dengan menggunakan singkatan “M.Sw.” dan “Az”, atau kalau mereka menulis di catatan pojok biasanya menggunakan nama samaran “Mr. X” dan “Beta”.

Sebagaimana *Soeara Merdeka* di Bandung, *Soeara Rakjat* juga tergolong pers yang moderat. Betapapun berada di jantung daerah pertempuran yang dahsyat pada akhir bulan

⁵⁸ Mengenai oplah *Soeara Rakjat* belum ditemukan informasi yang pasti, tapi nampaknya tidak jauh berbeda dengan *Soeara Merdeka* di Bandung. Begitu juga dengan daerah penyebarannya. Hanya saja ketika *Soeara Rakjat* sudah pindah ke Malang, tercatat beberapa agen surat kabar ini di Blitar, Kediri, dan Kertosono. Lihat “Berita Tata Oesaha”, *Soeara Rakjat* (Malang: 4 September 1946), hlm. 2.

⁵⁹ Lihat *Soeara Rakjat* (Malang: 17 Agustus 1946), hlm.11. Nampaknya ketika masih di Surabaya, *Soeara Rakjat* dikelola oleh Mohamad Sofwanhadi, Abdoel Azis, Ibnoe Soejachman, Djaswadi Soeprapto, Ronggodanoekoesoemo, Dermawan Loebis, dan Mohamad Ali. Setelah pindah dari Surabaya, Djaswadi Soeprapto menerbitkan *Soeara Rakjat* di Mojokerto; sedangkan Dermawan Loebis dan Ronggodanoekoesoemo menerbitkan *Soeara Rakjat* di Kediri. Selanjutnya lihat “Pertumbuhan Pers di Djawa Timur” dalam Sudarjo Tjokrosisworo (ed.), *Op.Cit.*, hlm. 228-30.

Oktober dan awal bulan Nopember 1945, *Soeara Rakjat* tetap berpandangan bahwa masyarakat hendaknya tetap tenang, bertindak rasional, penuh perhitungan, dan taat pada pimpinan nasional. Surat kabar ini, dengan demikian, jelas sangat mendukung langkah-langkah politik yang sedang ditempuh oleh pemerintah, yaitu politik diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional terhadap kemerdekaan RI.⁶⁰ Catatan pojok yang ditulis "Beta" (nama samaran Abdoel Azis, Pemimpin Redaksi *Soeara Rakjat*), ketika menanggapi sebagian keinginan sebagian besar "arek-arek" Surabaya untuk bertindak tegas dan berperang melawan tentara Sekutu, misalnya, juga menunjukkan sikap surat kabar itu yang tenang dan rasional.⁶¹

Memang untuk menunjukkan betapa hebat perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh "arek-arek" Surabaya itu, *Soeara Rakjat* juga memberikan pujian, penghormatan melalui slogan-slogan yang bombastis seperti: "*Darah, darah, darah Indonesia telah mengalir di Soerabaja ... oentoek kemerdekaan Indonesia, oentoek Repoebliek jang berkedaulatan Rakjat !!!*".⁶² Namun kembali lagi, betapapun suasananya tegang, cemas, kalut, dan kacau akibat pertempuran, surat kabar ini tetap memberikan bumbu-bumbu humor yang menggelitik dan segar. Melalui catatan-catatan pojoknya, "Beta" berhasil menggambarkan suasana revolusi secara hidup, terutama ketika menyinggung semangat tempur "arek-arek" Surabaya yang hebat itu. "... *Wah hebat. Saking hebatnja, orangnja masih digaris belakang, semangatnja soedah mentjolut lari ke garis depan, hingga jang bertempoer kelihatan hanja semangat melawan*

⁶⁰ Lihat, misalnya, tajuk *Soeara Rakjat* (Surabaya) seperti: "Hatta lawan Van Mook" (23 Oktober 1945); dan "Haloean Politik Pemerintah" (3 Nopember 1945).

⁶¹ *Soeara Rakjat* (Surabaya: 22 Oktober 1945), hlm. 2.

⁶² *Soeara Rakjat* (Surabaya: 4 Oktober 1945), hlm. 2, termasuk tajuknya yang berjudul "Menghormati Pahlawan".

miteralioer.”⁶³ Begitu juga ketika kelompok oposisi pada awal tahun 1946 mendesak pemerintah Sjahrir untuk merubah haluan politiknya dari “beroending” menjadi “bertempoer”, *Soeara Rakjat* termasuk pers yang mengajak para pembacanya untuk bersikap tenang, rasional, dan penuh perhitungan.⁶⁴

Dari gambaran seperti itu, sekali lagi, jelas sekali keberpihakan *Soeara Rakjat* kepada kepentingan politik pemerintah Sjahrir. Ketika pers lain, terutama *Kedaulatan Rakjat* di Yogyakarta dan *Merdeka* di Jakarta, pada pertengahan tahun 1946 meyangsikan kredibilitas politik dan pribadi Sutan Sjahrir, *Soeara Rakjat* malah mempromosikan kualitas pribadi Perdana Menteri RI itu dengan menurunkan tulisan bersambung yang berjudul “Siapa St. Sjahrir?”⁶⁵ Surat kabar ini pun, dengan demikian, sangat mendukung hasil-hasil Perundingan Linggarjati, yang diadakan dari bulan Nopember 1946 sampai dengan Maret 1947, sebagai produk dari politik diplomasinya pemerintah Sjahrir. Karena konsistensi dukungannya pada politik diplomasi itulah, barangkali, yang menyebabkan Abdoel Azis, Pemimpin Redaksi *Soeara Rakjat*, diundang oleh Sutan Sjahrir untuk mengikuti rombongan Perdana Menteri RI itu berkunjung ke India dalam rangka

⁶³ Lihat pojok *Soeara Rakjat* (Surabaya: 6 Oktober 1945), hlm. 2. Pernyataan ini mengingatkan kita pada cerpen kontekstualnya Idrus yang terkenal tentang “Surabaya”, dimana digambarkan secara sarkastis bahwa “arek-arek” Surabaya yang heroik itu berani bertempur menghadapi tentara musuh yang bersenjatakan granat-granat tangan. “Arek-arek” Surabaya sendiri tidak bersenjatakan apa-apa, hanya membawa lempeng atau ketupat sebesar kepalan tangan. Ketika pertempuran terjadi dan tentara musuh itu melemparkan granat tangannya, “arek-arek” Surabaya pun dengan semangat tinggi melemparkan lempeng atau ketupat itu, tidak menuju ke arah musuh tapi langsung ke mulut mereka sendiri untuk dimakan. Selanjutnya lihat Idrus, *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993, cet. kesepuluh).

⁶⁴ Lihat, misalnya, pojok *Soeara Rakjat* (Malang: 24 April 1946), hlm. 2.

⁶⁵ Tulisan itu nampaknya dibuat oleh J. de Kadt, orang Belanda yang simpati pada Sutan Sjahrir, dan dimuat dalam *Soeara Rakjat* (Malang: 13 Juli 1946; 15 Juli 1946; 16 Juli 1946; dan 17 Juli 1946).

“Konferensi Inter Asia”. Abdoel Azis sendiri kemudian menuliskan pengalaman-pengalaman pribadinya selama berada di New Delhi, India itu, dan dimuat dalam *Soeara Rakjat* secara bersambung.⁶⁶

Di sini mungkin menarik untuk melihat kesejajaran sikap dan jati diri *Soeara Rakjat* dengan visi pribadi para redaktur persnya, terutama Mohamad Sofwanhadi dan Abdoel Azis, masing-masing sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi surat kabar itu. Mohamad Sofwanhadi dilahirkan di Madiun pada tanggal 12 Maret 1912.⁶⁷ Bakat-bakat kewartawanannya sudah nampak ketika ia masih duduk dibangku sekolah menengah Belanda (MULO di Madiun dan AMS di Surabaya) pada tahun 1930-an. Pernah menjadi staf redaksi *Soeara Oemoem* (Surabaya), pers milik Parindra (Partai Rakyat Indonesia Raya) tahun 1935 dan memimpin *Pewarta Oemoem* (Solo) tahun 1939. Kedua surat kabar itu terkenal dengan pandangan-pandangannya yang nasionalis tapi tetap moderat. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Mohamad Sofwanhadi bekerja di bagian arsip surat kabar *Soeara Asia* (Surabaya). Lahirnya Indonesia merdeka pada bulan Agustus 1945 telah mendorong Mohamad Sofwanhadi, Abdoel Azis, dan wartawan-wartawan muda lainnya untuk mengambil alih dan merubah *Soeara Asia* yang pro Jepang itu menjadi *Soeara Rakjat* yang pro Republik. Akan halnya pribadi Abdoel Azis, nampaknya ia tergolong orang baru dalam dunia pers. Ketika

⁶⁶ Lihat, misalnya, artikel-artikel yang ditulis oleh Abdoel Azis dan dimuat dalam *Soeara Rakjat* (Malang) seperti: “Ke Loear Negeri” (21-22 April 1947); “Kita Terbang” (23 April 1947); “Bangkok Sebentar” (24 April 1947); “Di New Delhi” (25 April 1947); “Sekitar I.A.C.” (26, 28, dan 29 April 1947); “Raport2 I.A.C.” (30 April 1947); “Sultan Sjahriar” (3 Mei 1947); “Indonesia Diloear” (5 Mei 1947); “Delegasi Pakistan” (7 Mei 1947); “Manoesia Bertandoek, Bapak Repoloesi Zonder Kekerasan” (10 Mei 1947); dan “Radjamoeda jang Tjantik” (20 Mei 1947).

⁶⁷ Mengenai biodata Mohamad Sofwanhadi, lihat Soebagijo I.N., *Op.Cit.*, hlm. 380-84.

revolusi meletus, usianya baru 23 tahun. Sebagai orang muda terdidik dengan pandangan-pandangan yang rasional, Abdoel Azis menjadi lebih dekat dengan pemikiran, sikap, dan pendirian orang-orang Sosialis yang berpusat pada diri Sutan Sjahrir pada masa revolusi Indonesia. Dalam hal ini bisa difahami tentang sikap moderat dan akomodatif yang ditunjukkan *Soeara Rakjat* kepada pemerintah Sjahrir.

Seperti halnya pers republikan lain, sikap moderat dan akomodatif *Soeara Rakjat* itu tidak mengurangi serangan-serangannya yang tajam, tegas, dan kasar kepada pihak Belanda dan mereka yang mau mengganggu kemerdekaan Indonesia. Terhadap Van Mook, tokoh utama Belanda pada masa revolusi Indonesia, *Soeara Rakjat* menyebutnya sebagai "Bang Momok" atau orang yang menakutkan.⁶⁸ Tindakan-tindakan Van Mook yang sangat tidak populer pada masa revolusi itu, misalnya, dengan menjadikan Soerja Kartalegawa sebagai Presiden Negara Pasundan di Bandung untuk menandingi pemerintah dan negara RI yang berpusat di Yogyakarta. *Soeara Rakjat* bukan saja mengejek Soerja Kartalegawa dengan "*Djoeragan Karta*", sebuah istilah untuk menunjukkan betapa feodal dan gila hormatnya tokoh pendiri Negara Pasundan itu, tetapi juga menyerangnya sebagai tidak lebih dari sebuah "pion" yang sedang dimainkan oleh Van Mook.⁶⁹ Terhadap tokoh-tokoh pendiri NIT (Negara Indonesia Timur), *Soeara Rakjat* juga menyerangnya dengan tajam. NIT bukan saja diplesetkan sebagai "*Negara Ikoet Toean*", tetapi juga, dalam pandangan *Soeara Rakjat*, tidak semua kepulauan Indonesia bagian timur itu pro pada NIT. Dengan tegas surat kabar ini menyatakan bahwa orang-orang Irian jelas lebih berjiwa unitaris daripada federalis. *Soeara Rakjat* kemudian

⁶⁸ Lihat pojok *Soeara Rakjat* (Malang: 19 Pebruari 1946), hlm. 2.

⁶⁹ Lihat tajuk "Aksi Kartalegawa cs." dan berita "Sandiwara Djoeragan Karta" dalam *Soeara Rakjat* (Malang: 3 Mei dan 5 Mei 1947), hlm. 1.

menurunkan berita tentang sikap orang-orang IRIAN yang diartikannya sebagai: “*I(koet) R(epoeblik) I(ndonesia) A(nti) N(adjamoeddin)*”.⁷⁰ Nadjamoeddin adalah Perdana Menteri NIT.

Berbagai sindiran, ejekan, serangan dan kecaman yang dilakukan surat kabar ini tentu saja tidak menyenangkan Belanda. Para redaktur *Soeara Rakjat* sebenarnya juga sudah mengetahui tentang ketidaksenangan Belanda itu. Seminggu sebelum Belanda menyerang Indonesia, surat kabar ini menurunkan tulisan tentang jalan kekerasan yang akan ditempuh Belanda.⁷¹ Dan benar saja. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer 1 dan berhasil menduduki kota Malang, Jawa Timur. *Soeara Rakjat* yang beralamat di Jalan Semeru No.2 Malang itu pun ditutup penerbitannya oleh Belanda. Para redaktur persnya, Mohamad Sofwanhadi dan Abdoel Azis, pergi menyelamatkan diri dan berusaha menerbitkan pers di tempat lain. Mohamad Sofwanhadi pergi ke Madiun dan menerbitkan surat kabar *Api Rakjat*. Sedangkan Abdoel Azis pergi dari satu kota ke kota lain di pedalaman Jawa dan pernah menerbitkan surat kabar *Berita, Oetoesan Indonesia*, dan sejak tahun 1950 menerbitkan *Surabaya Post*.

Penutup

Pers pada masa awal revolusi Indonesia tumbuh seperti layaknya cendawan di musim hujan. Lahirnya negara RI yang baru itu segera didukung oleh persnya yang berjiwa “republikan”. Dalam hal ini maka hampir di setiap kota-kota penting di Jawa, memiliki beberapa penerbitan surat kabar. Suburnya kehidupan pers pada masa awal revolusi itu selain didorong oleh pemerintah RI – yang ingin menunjukkan

⁷⁰*Soeara Rakjat* (Malang: 24 dan 26 Juni 1947), hlm. 2.

⁷¹Lihat “*Progressief Belanda Quo Vadis ?*”, tajuk *Soeara Rakjat* (Malang: 15 Juli 1947), hlm. 1.

kepada masyarakat dunia bahwa revolusi Indonesia itu bercorak demokratis – juga karena pada redaktur pers yang umumnya berusia muda, berjiwa nasionalis, dan punya pengalaman di bidang jurnalistik itu ingin menyumbangkan peranan mereka sesuai dengan kemampuan dan profesinya dalam turut serta mempertahankan kemerdekaan RI.

Para redaktur pers pada masa revolusi, melalui pemberitaan (*news*) dan pandangan-pandangan (*views*) yang disajikan dalam surat kabar yang dikelolanya, berusaha menyakinkan dan mempengaruhi masyarakat untuk bersama-sama membela kemerdekaan dan keberadaan negara RI di satu sisi, dan melawan sedapat mungkin berbagai pihak yang ingin menegasikan dan mengganggu kemerdekaan negara RI di sisi lain.

Adalah menarik sikap dan pandangan masing-masing surat kabar dalam menanggapi berbagai kejadian politik penting dan problematika sosial pada zamannya. Dalam hal apakah usaha mempertahankan kemerdekaan RI itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berunding, pers memiliki sikap dan pandangan yang beragam. Tapi secara umum ada dua kecenderungan yang menarik. *Pertama*, bagi pers yang terbit di kota-kota yang telah diduduki oleh tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, nampaknya lebih bersikap moderat dan menghendaki cara-cara penyelesaian diplomasi dengan pihak Sekutu dan Belanda. Sedangkan yang *kedua*, bagi pers yang terbit di kota-kota yang tidak diduduki oleh tentara Sekutu, seperti Yogyakarta, maka sikapnya sangat keras dan menginginkan jalan pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan.

Dengan demikian sikap pers pada masa awal revolusi itu terbagi dua. Ada yang menghendaki jalan diplomasi seperti surat kabar *Merdeka*, *Soeara Merdeka*, *Warta Indonesia*, dan *Soeara*

Rakjat; dan ada juga yang menghendaki jalan pertempuran seperti surat kabar *Kedaulatan Rakjat*. Dan untuk bisa menjelaskan sebab dari fenomena itu sebagian dari tesisnya Benedict R.O'G. Anderson masih berlaku, yaitu bahwa bagi mereka yang tinggal di daerah pendudukan dan melihat setiap hari kekuatan tentara Sekutu di satu sisi dan masih lemahnya kekuatan pemerintah dan tentara Republik di sisi lain, maka jalan diplomasi dipandang sebagai solusi terbaik pada waktu itu. Sebaliknya bagi mereka yang tinggal di daerah Republik, yang tidak melihat kekuatan tentara Sekutu dan merasakan betul gelora semangat dari badan-badan perjuangan rakyat Indonesia, maka jalan pertempuran dianggap sebagai pilihan yang tepat.⁷² Namun tidak hanya faktor pengaruh ruang dan tempat saja, pandangan dan kepentingan pihak redaktur pers pun di sini perlu diperhatikan. Sebabnya ialah ada juga beberapa surat kabar yang terbit di daerah Republik yang menginginkan jalan diplomasi seperti nampak dalam kasus surat kabar *Gelora Rakjat* di Bogor atau surat kabar *Lasjkar* di Solo misalnya.

Demikian juga halnya dengan sikap dan pandangan pers dalam menanggapi permasalahan di sekitar Perundingan Linggarjati cukup beragam. Penyebabnya, sebagian, dapat dicari pada kenyataan bahwa perundingan itu sendiri di dalamnya terdapat kontradiksi-kontradiksi yang kompleks. Tidak hanya naskah perundingan itu, dalam perkembangan selanjutnya, menimbulkan perbedaan interpretasi dengan segala implikasinya yang mencolok antara kepentingan pihak Indonesia dan Belanda, tetapi juga pada masyarakat Belanda sendiri - sebagaimana juga pada masyarakat Indonesia - perundingan itu menimbulkan persoalan yang serius karena menyangkut kelangsungan tanah jajahannya, Indonesia, yang

⁷²Lihat Benedict R.O'G. Anderson, *Revoloesi Pemoeda ... Op.Cit..*

sangat potensial itu. Jadi betapapun perundingan itu pada awalnya diyakini sebagai penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak yang bertikai, yakni antara pihak Indonesia dan Belanda, namun dalam perkembangan selanjutnya hasil-hasil perundingan itu – dengan segala konsekuensinya – telah menimbulkan permasalahan tersendiri yang serius. Dan permasalahan seperti itu juga tidak luput dari perhatian pers.

Dalam hal ini ada fenomena yang menarik. Surat kabar *Merdeka* di Jakarta yang pada masa awal revolusi mendukung politik diplomasi pemerintah RI, dalam menanggapi hasil-hasil Perundingan Linggarjati justru menentang dengan keras. Sebaliknya surat kabar *Kedaulatan Rakjat* di Yogyakarta, yang semula menentang dengan keras politik diplomasi pemerintah RI, dalam menanggapi masalah Perundingan Linggarjati justru mendukungnya dengan sepenuh hati. Sementara itu surat kabar lainnya, seperti *Soeara Merdeka* di Tasikmalaya dan *Soeara Rakjat* di Malang,⁷³ tetap konsisten sikapnya yakni mendukung langkah-langkah politik pemerintah betapapun sikap kritisnya di sana-sini nampak juga. Mengenai surat kabar *Warta Indonesia* di Semarang, dalam masalah Perundingan Linggarjati, tidak diketahui sikapnya karena telah mengakhiri penerbitannya sejak bulan Nopember 1945. Dengan demikian maka beberapa perbedaan pandangan dan sikap surat-surat kabar itu, dalam kasus menanggapi Perundingan Linggarjati, sebagian dapat dilacak pada perbedaan kepentingan politik para redaktur persnya, dalam hal ini Pemimpin Umum dan atau Pemimpin Redaksi surat kabar yang bersangkutan.

Tentu saja perbedaan pandangan dan sikap dari surat-surat kabar itu lebih merupakan dinamika internal dalam

⁷³Sebagaimana diketahui bahwa surat kabar *Soeara Merdeka* yang semula terbit di Bandung pada masa awal revolusi kemudian pindah ke Tasikmalaya. Begitu juga dengan surat kabar *Soeara Rakjat* di Surabaya dalam perkembangan selanjutnya terbit di tiga tempat: Kediri, Mojokerto, dan Malang.

sebuah revolusi. Perbedaan dan bahkan konflik kepentingan yang menyerupai fenomena sentrifugal itu pada gilirannya justru bermuara pada semakin menguatnya fenomena sentripetal. Hal yang terakhir ini semakin kental ketika dalam sebuah revolusi disadari adanya pihak-pihak yang dipandang sebagai lawan bersama dan lawan bersama itu dinilai akan menegasikan eksistensi negara dan kemerdekaan Indonesia. Maka terhadap pihak Belanda dan orang-orang Indonesia yang mau dijadikan kaki-tangannya, seperti nampak dalam kasus berdirinya Negara Pasundan di Bandung dan Negara Indonesia Timur di Makasar (Ujung Pandang), pers Indonesia yang berjiwa republiken itu menyuarakan nada yang sama: menyerangnya dengan bahasa yang kasar, terus terang, sarkastis, dan vulgar. Dalam hal ini tidak terkecuali dengan "suara" dari kelima surat kabar yang dijadikan fokus dalam tulisan ini.

Andi Suwarta, *Pers, Revolusi, dan Demokratisasi:
Studi tentang Kehidupan dan Pandangan
Lima Surat Kabar di Jawa pada Masa Revolusi
Indonesia, 1945-47*